

## **Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu**

**Surajiyo**

**Universitas Indraprasta PGRI**

[drssurajiyo@gmail.com](mailto:drssurajiyo@gmail.com)

### ***ABSTRAK***

Ilmu dengan metode ilmiahnya bertujuan untuk mencapai kebenaran. Karena yang berilmu itu manusia, maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi dan korespondensi saja tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusianya. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia, jati diri bangsa Indonesia. Teori kebenaran Pancasila menghendaki, bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah. Artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya. Untuk pengembangan ilmu di Indonesia nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya.

Metode dalam penelitian ini dengan metode deskripsi yaitu pembahasan yang bersifat literer, khususnya literatur yang membahas masalah ilmu, teori kebenaran dalam ilmu, masalah Pancasila baik sebagai secara ilmiah maupun secara filsafati. Didalam metode ini dilakukan klasifikasi, pengolahan data dan penyimpulan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif kemudian diolah dengan metode analisa dan reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'.

**Kata Kunci:** *Teori Kebenaran, Ilmu Pengetahuan, Pancasila.*

### ***ABSTRACT***

Science with its scientific method aims to reach the truth. Because those who are knowledgeable are humans, the truth is not only purely fulfilling the criteria of coherence and correspondence but the truth must also be returned to humans. The development of science in Indonesia must also be returned to the Indonesian people, the identity of the Indonesian nation. The theory of truth of Pancasila requires that scientific truth at the same time fulfills the truth of coherence, correspondence, and pragmatics. These three things simultaneously complement each other in scientific work. It means not highlighting or emphasizing one of them. For the development of science in Indonesia, the truth value of Pancasila must be used as the basis.

The method in this research is the descriptive method, which is a literary discussion, especially literature that discusses the problem of science, the theory of truth in science, and the problem of Pancasila both scientifically and philosophically. In this method, classification, data processing, and conclusions are carried out. The data collected is qualitative data then processed by analytical and reflective methods, equipped with the 'verstehen' method.

**Keywords:** Theory of Truth, Science, Pancasila

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Itulah sebabnya, Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebutan nama yang menggambarkan fungsi dan perannya.

Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Tujuan nasional sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa, oleh penyelenggara negara, bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia

mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Sebab, pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa, justru dapat mengakibatkan sekularisme, seperti yang terjadi pada zaman *Renaissance* di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. (Dikti, 2016;196-197)

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu di Indonesia, maka perlu dikaji kebenaran yang khas menurut Pancasila terlebih dahulu. Sebab Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara akan selalu menjadi ukuran bagi setiap sikap dan perbuatan, termasuk kegiatan para ilmuwan dengan produk ilmunya.

Terkait dengan masalah kebenaran, sejak dahulu selalu menyertai setiap kegiatan ilmiah. Hal yang demikian ini karena pada ilmu, baik sebagai satu sistem maupun proses senantiasa ditujukan untuk mencapai kebenaran. Secara historis dapat diketahui, bahwa dalam hal kebenaran sudah ada tiga paham tradisional yang besar, yaitu paham koherensi, korepondensi, dan pragmatik. Tetapi timbul masalah lain, yaitu seandainya hendak berpikir secara sistematis sekaligus sintetik, maka kiranya ketiga macam paham tersebut dapat dipadukan dalam satu kerangka yang seluas-luasnya. Sehingga diharapkan dapat merangkum segenap paham yang lain.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini dengan metode deskripsi yaitu pembahasan yang bersifat literer, khususnya literatur yang membahas masalah ilmu, teori kebenaran dalam ilmu, masalah Pancasila baik sebagai secara ilmiah maupun secara filsafati. Didalam metode ini dilakukan klasifikasi, pengolahan data dan penyimpulan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif kemudian diolah dengan metode analisa dan reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Metode analisa yakni cara penanganan terhadap barang sesuatu atau obyek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milahkan pengertian satu dengan pengertian yang lainnya. Dengan metode ini berarti berbagai pengertian dan ciri ilmu serta teori kebenaran, kajian Pancasila secara ilmiah dan filosofis yang beragam dipilah-pilahkan, kemudian diambil khususnya yang relevan dengan tema yakni teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu saja. Metode reflektif yakni dalam memecahkan masalah dengan suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang dilandasi proses berpikir mendalam. Metode 'verstehen' dalam arti perlu pemahaman sesuai dengan konteksnya yakni kode etik profesi akuntan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

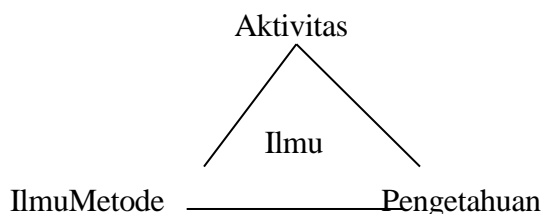
#### Pengertian dan Ciri-ciri Ilmu

Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek yang dihadapinya, atau hasil usaha manusia untuk memahami suatu obyek tertentu. Cabang filsafat yang membahas pengetahuan disebut Epistemologi. Istilah lain dalam kepustakaan filsafat dari epistemologi adalah Filsafat pengetahuan, Gnosiologi, Kritika pengetahuan, logika material, teori pengetahuan, kriteriologi.

Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode dan validity pengetahuan.

Ilmu pengetahuan diambil dari kata bahasa Inggris *science*, yang berasal dari bahasa latin *scientia* dari bentuk kata kerja *scire* yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjuk pada segenap pengetahuan sistematis.

The Liang Gie (2000; 88-89) memberikan pengertian ilmu adalah rangkaian aktivitas penelaahan yang mencari penjelasan suatu metode untuk memperoleh pemahaman secara rasional empiris mengenai dunia ini dalam berbagai seginya, dan keseluruhan pengetahuan sistematis yang menjelaskan berbagai gejala yang ingin dimengerti manusia. Dari definisi tersebut jika digambarkan ke dalam suatu bagan akan terlihat sebagai berikut :



Dari bagan tersebut menggambar bahwa ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia, aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis.

Pengetahuan ilmiah menurut The Liang Gie (2000; 127-130) mempunyai 5 ciri pokok :

1. Empiris. Pengetahuan itu diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan

2. Sistematis. Berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur.
3. Obyektif. Ilmu berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi.
4. Analitis. Pengetahuan ilmiah berusaha membedakan pokok-soalnya ke dalam bagian-bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu.
5. Verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga.

Sedangkan Daoed Joesoef (1987) menunjukkan bahwa pengertian ilmu mengacu pada tiga hal, yaitu: produk, proses, masyarakat. Ilmu pengetahuan sebagai produk yaitu pengetahuan yang telah diketahui dan diakui kebenarannya oleh masyarakat ilmuwan. Pengetahuan ilmiah dalam hal ini terbatas pada kenyataan-kenyataan yang mengandung kemungkinan untuk disepakati dan terbuka untuk diteliti, diuji dan dibantah oleh seseorang.

Ilmu pengetahuan sebagai proses artinya kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan demi penemuan dan pemahaman dunia alami sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Metode ilmiah yang khas dipakai dalam proses ini adalah analisis-rasional, obyektif, sejauh mungkin *'impersonal'* dari masalah-masalah yang didasarkan pada percobaan dan data yang dapat diamati.

Ilmu pengetahuan sebagai masyarakat artinya dunia pergaulan yang tindak-tanduknya, perilaku dan sikap serta tutur katanya diatur oleh empat ketentuan yaitu universalisme, komunalisme, tanpa pamrih, dan skeptisisme yang teratur. (Daoed Joesoef, 1987; 25-26)

Van Melsen (1985; 65-67) mengemukakan ada delapan ciri yang menandai ilmu, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian (metode) maupun harus (susunan logis).
2. Ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan.
3. Universalitas ilmu pengetahuan.
4. Obyektivitas, artinya setiap ilmu dipimpin oleh obyek dan tidak didistorsi oleh prasangka-prasangka subyektif.
5. Ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan, karena itu ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan.
6. Progresivitas artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh, bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi.
7. Kritis, artinya tidak ada teori yang difinitif, setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru.
8. Ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertauan antara teori dengan praktis.

### **Pancasila dan Upaya Mencapai Kebenaran**

Pembahasan tentang apa itu kebenaran dalam konteks Pancasila, secara tegas tidak banyak terungkap dalam literatur-literatur tekstual. Namun, pengkajian Pancasila dalam wilayah keilmiahan bukanlah sesuatu yang baru. Salah satu tokoh pemikir yang banyak mengkaji Pancasila, Notonagoro, telah memberikan dasar-dasar pada kita dalam

menafsirkan Pancasila secara ilmiah. Ada tiga alasan yang menjadi landasan perlunya Pancasila ditelusuri secara ilmiah yakni: 1. Menteri Roeslan Abdulgani yang pada seminar Manipol di Bandung pada tanggal 28 Januari 1961 menyatakan bahwa Presiden Soekarno menghendaki penarikan ke atas (perumusan teori Pancasila, khususnya Filsafat Pancasila) dan penarikan ke bawah ajaran Pancasila (tingkat penjabaran dan pelaksanaannya, yang boleh disebut dengan sikap hidup). 2. Jawaban Presiden Soekarno dalam rapat DPA sebelum 28 Januari 1961 yang menegaskan bahwa Sosialisme Indonesia dan ajaran Pancasila bersifat ilmiah dan religius. Ilmiah dalam arti: 1) suatu ajaran ilmiah, yang bersifat khusus berlaku bagi waktu, tempat, keadaan, golongan manusia, atau bangsa tertentu; 2) lebih tinggi tingkatnya daripada itu ialah suatu teori ilmiah yang meliputi segala faktor tadi yang lebih luas; dan 3) tingkat yang lebih tinggi lagi ialah sistem kefilosofan yang terluas dalam segala faktornya, sampai dapat mencapai tingkat dan luas yang abstrak, umum, dan universal. 3. Ketetapan MPRS no. II/MPRS/1960/ yang menentukan tentang pembangunan mental berdasarkan Pancasila yang menghendaki pula berfikir secara abstrak, secara ilmiah dan secara filsafati terhadap Pancasila. (Notonagoro, 1984: 30-31)

Filsafat Pancasila, menurut Notonagoro, menjadi penting sebab “tidak ada bahan yang resmi untuk mengetahui isi daripada lima asas yang dimaksudkan.” (Notonagoro, 1984). Berdasarkan pada pendapat Notonagoro dan tiga alasan tersebut, menjadikan setiap persolan mengenai segala hal dalam ranah ilmiah yang kemudian dikaitkan dengan Pancasila harus mengacu pada lima sila dalam Pancasila, termasuk mengenai kebenaran, yakni:

### *Ke-Tuhanan*

Menurut Notonagoro, sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan, bagi sikap dan perbuatan anti-Ketuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama. Pertentangan dalam hal ke-Tuhanan pada dasarnya berasal dari dunia Barat yang bersumber pada pengaruh hasil ilmu pengetahuan alam kodrat. (Notonagoro, 1995: 72-74)

Berdasarkan tafsir Notonagoro ini, maka kebenaran dalam konteks Pancasila dipahami atau dimaknai sebagai tiadanya pertentangan dengan Tuhan. Dalam makna yang lain, kebenaran adalah kesesuaian dengan nilai-nilai ketuhanan. Hidup yang benar apabila kehidupan yang dijalani mengandung harmonisasi dengan kehendak Tuhan. Hal ini tentu berbeda dengan dunia ilmu pengetahuan di Barat yang seringkali mengabaikan harmonisasi dengan kehendak dalam mencapai kebenaran. Makna kebenaran ini sangat berbeda dengan yang berlaku di Barat. Teori kebenaran korespondensi, misalnya, yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian dengan fakta (*fact*).

Mengenai kebenaran akan adanya Tuhan, seperti Aristoteles, Pancasila dalam tafsir Notonagoro memaknai Tuhan sebagai *causa prima*. Dia mengatakan: “Hakekat Tuhan adalah *causa prima*, dan unsur-unsur hakekat yang terkandung dalam *causa prima*.” (Notonagoro, 1995: 77) Namun tentunya, Pancasila tidak mengandung dualisme materi dan bentuk dalam filsafat Aristoteles.

### *Kemanusiaan*

Kebenaran adalah aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakekat manusia. Notonagoro menyatakan, sila kedua dari Pancasila mengandung cita-cita

kemanusiaan, yang lengkap sempurna memenuhi hakekat manusia. (Notonagoro, 1995: 93) Hakekat yang dimaksud dalam hal ini meliputi: bhinneka-tunggal dan majemuk-tunggal atau monopluralis.

Hakekat bhinneka-tunggal menunjukkan bahwa pada manusia terdapat gejala-gejala alam atau proses-proses fisis, gejala-gejala vegetatif, dan gejala-gejala animal. Selain itu, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan, manusia memiliki kemampuan berpikir, merasa, dan berkehendak. Sedangkan hakekat majemuk-tunggal atau monopluralis menunjukkan bahwa hakekat manusia itu adalah untuk melakukan perbuatan lahir dan batin atas dorongan kehendak, berdasarkan atas putusan akal, selaras dengan rasa untuk memenuhi hasrat-hasrat sebagai ketunggalan, yang ketubuhan, yang kejiwaan, yang perseorangan, yang kemakhlukan sosial, yang berkepribadian berdiri sendiri, yang kemakhlukan Tuhan. (Notonagoro, 1995: 94)

Sesuatu hal dikatakan benar apabila sesuatu itu mendorong pada semakin menguatnya nilai-nilai kemanusiaan. Segala upaya mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara tidak mendapatkan tempat dalam Pancasila. Sebagai refleksi, Niccolo Machiavelli. Baginya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan dapat dibenarkan.

### *Persatuan*

Notonagoro menyatakan, sifat mutlak kesatuan bangsa, wilayah dan Negara Indonesia yang terkandung dalam sila ketiga, dengan segala perbedaan dan pertentangan di dalamnya, memenuhi sifat hakekat daripada satu, yaitu mutlak tidak dapat dibagi. Segala perbedaan dan pertentangan adalah hal yang biasa yang justru pasti dapat disalurkan untuk memelihara dan mengembangkan kesatuan kebangsaan. (Notonagoro, 1995: 120)

Berangkat dari pemahaman di atas tersebut, maka kebenaran adalah suatu hal yang satu, tidak dapat dibagi-bagi. Namun, untuk mencapai kebenaran tidak berarti menutup segala bentuk dinamika pemikiran. Pertentangan dan perbedaan adalah niscaya sebagai bagian dari proses menuju yang satu, yang benar. Karena itulah, demokrasi memiliki tempat dalam aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

### *Kerakyatan*

Dalam dunia kefilosofan Barat, kita mengenal pragmatisme yang menganggap bahwa sesuatu itu benar apabila memiliki faedah atau bermanfaat bagi sesuatu yang lain. Kebenaran adalah sesuai atau searah dengan kemanfaatan. Nampaknya kebenaran dalam artian ini dapat kita temukan dalam Pancasila sila keempat.

Menurut Notonagoro, sila keempat terdiri atas dua cita-cita kefilosofan, yaitu: 1. Kerakyatan yang mengandung cita-cita bahwa negara adalah alat bagi keperluan seluruh rakyat serta pula cita-cita demokrasi sosial-ekonomi. 2. Musyawarah atau demokrasi politik yang dijabarkan dalam asas politik negara, ialah Negara Berkedaulatan Rakyat. (Notonagoro, 1995: 138)

Kebenaran merupakan persoalan apakah sesuatu itu bermanfaat atau tidak. Sesuatu akan bermanfaat apabila dirumuskan secara bersama-sama dengan keterlibatan bersama dari subjek. Dalam hal ini setiap manusia adalah subjek dan objek dari apa yang dianggap benar. Namun tidak seperti pragmatisme yang berbicara kebenaran pada tataran antar individu, Pancasila berbicara pada tataran massa (rakyat). Dengan kata lain, kebenaran adalah kemanfaatan untuk semua pihak.

### *Keadilan*

Kebenaran adalah terpenuhinya hakekat keadilan (adil). Inilah makna kebenaran dalam Pancasila yang bersumber dari sila kelima. Hakekat daripada adil menurut pengertian ilmiah, yaitu terpenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara satu dengan yang lain adalah wajib. (Notonagoro, 1995: 162-163) Sehingga, kebenaran dalam konteks Pancasila merupakan kebenaran yang memiliki keterkaitan dengan moralitas.

Pemahaman Pancasila secara filosofis, akan mengingatkan kita semua bahwa Pancasila bukanlah sekedar suatu konsensus politik, melainkan juga sebagai suatu konsensus filosofis/moral yang mengandung suatu komitmen transendental yang menjanjikan persatuan dan kesatuan sikap, serta pandangan kita dalam menyambut masa depan gemilang yang kita cita-citakan bersama. (Burhanuddin Salam, 1988) Sebagai filsafat atau pandangan hidup, Pancasila bermakna jauh lebih luas dan lebih dalam daripada sekedar pragmatisme.

Namun, yang perlu kita sadari bahwa kritik pragmatisme sangat penting bagi masa depan Pancasila. Bagi pragmatisme, Pancasila dalam pidato dan upacara tidak berarti apa pun. *Pragma* berarti tindakan sehingga tuntutan-tuntutan pragmatisme banyak berada pada taraf perilaku yang harus diterjemahkan dari nilai-nilai sebuah gagasan. (Slamet Sutrisno, 2006: 151-152)

### **Teori Kebenaran Pancasila**

Dalam lingkup perbincangan kefilosofatan, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi tiga teori kebenaran, yakni teori kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Sehingga sistem filsafat Pancasila menjadi tangguh di hadapan sistem filsafat yang lain.

### **1. Teori koherensi**

Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Menurut Notonagoro (1975: 19), Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan, tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Semuanya menyusun hal yang baru dan utuh. Setiap bagian Pancasila merupakan bagian yang mutlak, jika dihilangkan satu bagian saja hilanglah halnya, sebaliknya terlepas dari halnya, bagian tersebut dihilangkan kedudukan dan fungsinya. Selain itu, setiap sila Pancasila di dalamnya mengandung sila yang lainnya. Terdapat hubungan yang saling mengkualifikasi. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Begitu seterusnya dengan sila yang lain pula. Hubungan satu kesatuan dan saling mengkualifikasi ini terjadi karena tidak ada pertentangan sila yang satu dengan sila yang lainnya, hubungan sila kesatu sampai sila kelima bersifat runtut. Inilah satu penerapan teori koherensi.

Hubungan logis sebagai pengakuan atau cerminan teori koherensi terlihat pada susunan Pancasila yang menurut Notonagoro bersifat hirarkhis dan berbentuk piramidal (Suhadi, 1980: 14). Artinya, kelima sila Pancasila itu menunjukkan satu rangkaian yang bertingkat, sehingga tidak boleh dibolak-balik tata urutannya. Hal ini juga menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Setiap sila yang ada di belakangnya lebih sempit cakupannya tetapi lebih banyak isi sifatnya.

Selain itu, hubungan konsistensi ini terlihat pada Pancasila sebagai aksioma kemudian diturunkan keempat pokok pikiran sebagai teorema, dan selanjutnya diturunkan ke pasal UUD 1945. Dalam penjabaran ini telah terbukti bahwa pasal-pasal UUD 1945

konsisten dengan empat pokok pikiran, dan empat pokok pikiran konsisten dengan Pancasila (Bakry, 1994: 47). Jelaslah bahwa sistem filsafat Pancasila mengakui dan menerapkan teori kebenaran koherensi.

## 2. Teori korespondensi

Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia, berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa dan pedoman hidup bangsa. Hal ini benar jika sesuai dengan kenyataan sehari-hari (Bakry, 1994: 49). Hal ini tepat pendapat Notonagoro (1975: 17), bahwa bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tri-prakara, yakni Pancasila adat kebudayaan, religius, dan kenegaraan. Kenyataan ini bisa dilihat dalam dinamika hidup sehari-hari masyarakat dan bangsa Indonesia.

Isi arti Pancasila yang abstrak umum universal dapat menjadi sumber landasan pemecahan masalah kenyataan hidup sehari-hari. Menurut Notonagoro, ada hubungan yang mutlak antara Pancasila dengan bangsa Indonesia, yaitu hubungan sebab-akibat (Soeprapto, 1994: 53). Segala sesuatu mulai dari kepribadian bangsa dan kehidupan bermasyarakat harus sesuai dengan hakikat yang terdapat dalam sebabnya. Maka kebenaran menurut pragmatika filsafat Pancasila, bahwa kandungan pernyataan sila-sila Pancasila harus cocok, sesuai, terjelma dalam keadaan senyatanya bermasyarakat dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila berkesesuaian atau koresponden dengan objek yang dituju.

## 3. Teori pragmatik

Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam

Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Hal ini memang menunjukkan bahwa sistem filsafat Pancasila berfungsi secara praktis. Fakta sejarah telah membuktikan, baik sejak proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara maupun dalam menghadapi berbagai pemberontakan, dengan jiwa Pancasila ini persatuan dan kesatuan tetap terjaga (Bakry, 1994: 49). Para penganut Pancasila percaya akan kebenaran Pancasila, karena Pancasila bersifat fungsional dalam mempersatukan bangsa Indonesia.

Jika dilihat dari segi historis, Pancasila juga memiliki fungsi praktis. Hal ini karena Pancasila merupakan jawaban atas pertanyaan esensial dalam sidang BPUPK dan PPKI; "Jika negara kita merdeka, maka apa dasarnya?", apa landasan yang mau dipakai. Analisis empat kausalitas Aristoteles dari Notonagoro kiranya membuktikan fungsi praktis ini. Salah satu relasi kausalitas tersebut adalah kausa finalis. Kausa finalis Pancasila adalah sebagai dasar kefilosofan negara atau dasar negara Indonesia merdeka. Proposisi-proposisi dalam sistem filsafat Pancasila terlihat kemanfaatannya sebagai dasar negara Indonesia, bukan hanya proposisi yang koheren dan koresponden dengan kenyataan saja.

Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan, di dalam diri Pancasila juga mengandung persatuan dan kesatuan. Jika di dalam diri Pancasila mengandung tiga teori kebenaran: koherensi, korespondensi, dan pragmatik; maka konsekuensinya menurut Pancasila pernyataan atau proposisi benar jika runtut, konsisten, sesuai dengan kenyataan dan sekaligus membawa kefaedahan. Ketiga teori tersebut menurut Pancasila tidak dipertentangkan tetapi saling melengkapi. Dalam hal saling melengkapi itu, mengikuti asas hirarkhis-piramidal dan saling mengkualifikasi dalam Pancasila



dengan urutan: koherensi, korespondensi dan pragmatik.

### **Konsep Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu.**

Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. **Pertama**, bahwa setiap ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. **Kedua**, bahwa setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. **Ketiga**, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu di Indonesia, artinya mampu mengendalikan ilmu agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. **Keempat**, bahwa setiap pengembangan ilmu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri atau yang lebih dikenal dengan istilah indegenisasi ilmu (mempribumia ilmu). (Dikti, 2016)

Keempat pengertian Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung konsekuensi yang berbeda-beda. Pengertian pertama bahwa ilmu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung asumsi bahwa ilmu itu sendiri berkembang secara otonom, kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Pengertian kedua bahwa setiap ilmu yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengandaikan bahwa sejak awal pengembangan ilmu sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam

posisi tarik ulur, artinya ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan.

Pengertian ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu mengasumsikan bahwa ada aturan main yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa aturan main itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan ilmu itu sendiri. Sebab ketika ilmu terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan ilmu dan aturan main.

Pengertian keempat yang menempatkan bahwa setiap pengembangan ilmu harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indegenisasi ilmu mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. (Dikti, 2016)

Menurut Kaelan (2000) bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek yakni :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, perimbangan antara rasional dengan irrasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini

- iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya. Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematis dari alam yang diolahnya.
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Iptek harus dapat diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari penggunaan iptek.
  3. Sila Persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek, dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara, persaudaraan dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, Iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional.
  4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek setiap ilmuwan juga harus menghormati

dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya.

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya.

### **Visi Ilmu di Indonesia.**

Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masa depan yang dicita-citakan. Penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara diorientasikan ke arah perwujudan visi tersebut karena pada hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat.

Bagi Bangsa Indonesia strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Koento Wibisono (1994) ada dua hal pokok yaitu : Visi dan orientasi filosofiknya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam menghadapi masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data/fakta obyektif dalam satu kesatuan integratif.

Visi dan orientasi operasionalnya diletakkan pada dimensi-dimensi :

- a. **Teleologis**, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang

memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu *teleos* (tujuan), yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

- b. **Etis**, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab.
- c. **Integral/Integratif**, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya, sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasi ke dalam masyarakat yang juga harus ditingkatkan kualitas strukturnya.

Dengan visi ilmu tersebut maka perlu refleksi anjuran-anjuran bagaimana membangun pemikiran ilmiah di Indonesia. Prof. T. Jacob (dalam A.H. Mintaredja, 1990) menganjurkan bahwa dalam rangka mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang cenderung mengancam otonomi manusia, para ilmuwan selayaknya memperhatikan agama, etika, filsafat dan sejarah ilmu.

Dengan berorientasi Pancasila secara ilmiah dalam upaya mencari kebenaran dan konsep bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia serta visi ilmu di Indonesia tersebut maka ilmu yang dikembangkan di Indonesia tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Teori kebenaran Pancasila menghendaki, bahwa kebenaran ilmiah itu sekaligus memenuhi kebenaran koherensi, korespondensi, dan pragmatik. Ketiga hal tersebut secara simultan saling melengkapi dalam kerja ilmiah. Artinya tidak menonjolkan atau mementingkan salah satunya.
2. Pemahaman filosofis tentang kebenaran dalam konteks Pancasila dapat digeneralisasikan bahwa dalam konteks Pancasila, kebenaran adalah 1) tiadanya pertentangan dengan Tuhan, 2) aktualisasi atau perwujudan dan terpenuhinya hakekat manusia, 3) suatu hal yang satu, tidak dapat dibagi-bagi, 4) kemanfaatan pada semua pihak, dan 5) terpenuhinya hakekat keadilan (adil). Untuk pengembangan ilmu di Indonesia nilai kebenaran Pancasila harus dijadikan dasarnya
3. Dengan berorientasi Pancasila secara ilmiah dalam upaya mencari kebenaran dan konsep bahwa Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia serta visi ilmu di Indonesia tersebut maka ilmu yang dikembangkan di Indonesia tidak akan ada alienasi terhadap bangsa Indonesia, tetapi sepenuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan DIKTI. 2016, *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: DIKTI.
- Joesoef, Daoed, 1987, "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan", dalam Soeroso H. Prawirohardjo, dkk., *Pancasila Sebagai Orientasi*

- Pengembangan Ilmu*, Yogyakarta: PT Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat.
- Kaelan, 2000, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Reformasi, Yogyakarta: Penerbit paradigma.
- Melson, Van, AGM., 1985, *Ilmu Pengetahuan Dan Tanggung Jawab Kita*, Jakarta: PT Gramedia, Terjemahan K. Bertens, Judul asli "Wetenschap en Verantwoording".
- Mintaredja, Abbas Hamami. 1990. 'Epistemologi Masa Depan'. Dalam *Jurnal Filsafat*, Seri 1, Februari 1990.
- Noor MS. Bakry, 1994, **Orientasi Filsafat Pancasila**, Liberty, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1975, **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Pantjuran Tujuh, Jakarta.
- Notonagoro. 1984. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, dalam P. Hardono Hadi, 1994, **Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila**, Yogyakarta: Kanisius.
- Notonagoro. 1995. **Pancasila Secara Ilmiah Populer**, Jakarta: Bumi Aksara.
- Salam, Burhanudin. 1988, **Filsafat Pancasilaisme**, Yogyakarta : Kanisius.
- Siswomihardjo, Koento Wibisono, 'Gagasan Strategik tentang Kultur Keilmuan pada Pendidikan Tinggi' dalam *Jurnal Filsafat*, Edisi Khusus Agustus 1997.
- Soemargono, Soejono. 1983. 'Ilmu dan Kebenaran'. Dalam **Beberapa Pemikiran Filsafat**. Yogyakarta. Fakultas Filsafat UGM.
- Sutrisno, Budi. 2006. "Teori Kebenaran Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu". Dalam *Jurnal Filsafat*. Volume 39, Nomor 1, April 2006.
- Sutrisno, Slamet. 2006. **Filsafat dan Ideologi Pancasila**, Yogyakarta: Andi Offset.